

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Mengalami Pelecehan Seksual Verbal Akibat Aktivitas *Live Streaming* Di Media Sosial Tiktok ini ditulis oleh Agata Amara Putri, NIM. 126103201005, Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 2024, dibimbing oleh Yusron Munawir, S.H., M.H.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak di Bawah Umur, Pelecehan Seksual Verbal, *Live Streaming* Tiktok

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kasus pelecehan seksual verbal yang terjadi pada anak dibawah umur melalui *live streaming* di media sosial tiktok. Salah satu faktor yang membuat tindak pidana pelecehan seksual di media sosial cenderung mengalami peningkatan bukan penuruan adalah masih belum adanya peraturan hukum yang bersifat komprehensif dalam mengatasi kasus terkait pelecehan seksual yang terjadi melalui media sosial. Pelaku pelecehan seksual verbal juga kerap kali tidak mendapatkan hukuman yang setimpal dan tidak menimbulkan efek jera atau takut, sehingga kecenderungan untuk mengulangi kejadian yang serupa di lain waktu. Lemah payung hukum menimbulkan celah ketidakadilan bagi korban karena pelecehan seksual verbal menimbulkan efek trauma namun menghadirkan dilema baru karena biasanya pelaku tidak menimbulkan bukti apapun. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi, 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang mendapatkan pelecehan seksual verbal dalam aktivitas *live streaming* di media sosial tiktok?, 2) Bagaimana politik hukum perlindungan anak dibawah umur dalam aktivitas *live streaming* di media sosial tiktok ?.

Penelitian dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif, yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, bahan hukum, dan sebagainya sebagai dasar untuk diteliti. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang merujuk sebab belum atau tidak adanya aturan hukum untuk masalah yang dihadapi dan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis seluruh undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum terkait penyelenggaraan berbasis internet.

Hasil penelitian menunjukkan, 1) Perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang mendapatkan pelecehan seksual verbal akibat aktivitas *live streaming* di media sosial tiktok telah diatur dalam sejumlah regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak harus dijamin dan dilindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai mendistribusikan, menransmisikan, atau

membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang melanggar kesiusilaan, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur mengenai perbuatan seksual nonfisik. Namun diantar ketiga peraturan perundang-undang tersebut masih belum adanya peraturan yang mengatur secara khusus mengenai pelecehan seksual verbal yang terjadi melalui media sosial 2) Penambahan frasa baru dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai bentuk kebijakan untuk memberikan Solusi terhadap permasalahan terkait pelecehan seksual verbal yang terjadi melalui media sosial yang berbunyi “Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik baik dilakukan secara langsung maupun melalui media elektronik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesiusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (*sembilan*) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)”

ABSTRACT

Agata Amara Putri, NIM. 126103201005, Constitutional Law Study Program, Sayyid Ali Rahmatullah University Tulungagung 2024, wrote the thesis called "Judicial Analysis Of Legal Protection For Minors Who Experience Verbal Sexual Disclosure Due to Live Streaming Activities on Tiktok Social Media." under the supervision of Yusron Munawir, S.H., M.H.

Keywords: Legal Protection, Minors, Verbal Sexual Harassment, Tiktok Live Streaming

This research was motivated by a number of cases of verbal sexual harassment that occurred against minors through live streaming on tiktok social media. One of the factors that makes criminal acts of sexual harassment on social media tend to increase rather than decrease is that there is still no comprehensive legal regulation in dealing with cases related to sexual harassment that occur via social media. Perpetrators of verbal sexual harassment also often do not receive adequate punishment and do not create a deterrent or fearful effect, resulting in a tendency to repeat similar incidents at a later time. A weak legal umbrella creates a gap in injustice for victims because verbal sexual harassment causes trauma effects but presents a new dilemma because usually the perpetrator does not provide any evidence. The problem formulation in this research includes, 1) What is the legal protection for minors who experience verbal sexual harassment in activities live streaming on TikTok social media?, 2) What are the legal politics related to the regulation of verbal sexual harassment against minors in activities live streaming on social media tiktok ?.

The research was carried out using a normative juridical research method, which was carried out by examining library materials or secondary data which included statutory regulations, legal materials, and so on as a basis for research. The research approach used is a conceptual approach (conceptual approach) which refers to the reason there is not yet or no legal regulation for the problem faced and the legal approach (statute approach) which is done by reviewing and analyzing all laws and regulations related to legal issues related to internet-based maintenance.

The research results show, 1) Legal protection for minors who receive verbal sexual harassment due to activities live streaming TikTok social media has been regulated in a number of regulations, namely Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection which states that every child must have their rights guaranteed and protected so that they can live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity, and receive protection from violence and discrimination, Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions which regulates distributing, transmitting or making accessible electronic information or electronic documents that violate decency, and Law Number 12 of 2022 concerning Actions Criminal Sexual Violence which regulates non-physical sexual acts. However, among these three laws and regulations, there are still no regulations that specifically regulate verbal sexual harassment that occurs via social media. 2) The addition of a new phrase in Article 5 of Law Number

12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence as a form of policy to provide The solution to problems related to verbal sexual harassment that occurs through social media, which states "Every person who commits non-physical sexual acts, either directly or through electronic media, which is directed at the body, sexual desires and/or reproductive organs with the intention of degrading the dignity of a person, based on their sexuality and/or decency, is punished for non-physical sexual harassment, with a maximum prison sentence of 9 (nine) month and/or a maximum fine of IDR 10,000,000 (ten million rupiah)"

التجريـد

البحث العلمي بعنوان "التحليل القانوني لحماية الأطفال الفُصَّر من التحرش الجنسي اللفظي نتيجة أنشطة البث المباشر عبر وسيلة تواصل تيك توك الاجتماعي "كتبهْ أغاثا أمara فوتري، رقم الطالبة 126103201005، من برنامج دراسة القانون الدستوري، جامعة السيد علي رحمة الله الإسلامية الحكومية تولونج أجونج، 2024، تحت إشراف يُسران منور الماجستير.

الكلمات المفتاحية :الحماية القانونية، الأطفال الفُصَّر، التحرش الجنسي اللفظي، البث المباشر عبر تيك توك.

يأتي هذا البحث على خلفية تزايد حالات التحرش الجنسي اللفظي، بالأطفال الفُصَّر عبر البث المباشر على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة على منصة تيك توك . ومن أحد العوامل التي تؤدي إلى تزايد حالات التحرش الجنسي على وسائل التواصل الاجتماعي هو عدم وجود تشريعات قانونية شاملة تعالج قضايا التحرش الجنسي التي تحدث عبر هذه الوسائل . غالباً ما يفلت مرتكبو التحرش الجنسي اللفظي من العقوبة الملائمة، مما لا يخلق لديهم رادعاً أو خوفاً، وبالتالي يستمر تكرار هذه الأفعال في المستقبل . يؤدي ضعف الحماية القانونية إلى فجوة في تحقيق العدالة للضحايا، لأن التحرش الجنسي اللفظي يسبب تأثيراً نفسياً صادماً لكنه في الوقت ذاته يخلق معضلة جديدة لأن الجاني عادة لا يترك أي دليلاً مادياً . يشمل تحديد هذا البحث حول : 1 (كيف يمكن توفير الحماية القانونية للأطفال القصر الذين يتعرضون للتحرش الجنسي اللفظي في نشاط البث المباشر على تيك توك؟) و 2 (كيف يتم تنظيم السياسات

القانونية المتعلقة بالتحرش الجنسي اللفظي بالأطفال القصر في سياق البث المباشر على تيك توك؟

يعتمد في هذا البحث على المنهج القانوني النظري، حيث يتم دراسة المواد القانونية أو البيانات الثانوية مثل التشريعات واللوائح القانونية وغيرها كأساس للتحليل. ويتبع البحث نهجاً مفاهيمياً يشير إلى غياب أو عدم وجود قاعدة قانونية للمشكلة المطروحة، إلى جانب نهج تشريعي يتمثل في دراسة وتحليل كافة القوانين واللوائح المتعلقة بالقضايا القانونية المرتبطة بالبث عبر الإنترن트.

ونتيجة البحث الأولى هي توفر الحماية القانونية للأطفال القصر الذين يتعرضون للتحرش الجنسي اللفظي عبر البث المباشر على تيك توك من خلال عدد من القوانين، مثل قانون رقم 35 لسنة 2014 بشأن حماية الطفل، والذي ينص على ضرورة ضمان حقوق الطفل وحمايته ليتمكن من العيش والنمو والمشاركة بشكل إنساني ويستحق الحماية من العنف والتمييز. وكذلك قانون رقم 19 لسنة 2016 بشأن المعلومات والمعاملات الإلكترونية، الذي ينظم نشر أو إرسال أو إتاحة المعلومات أو الوثائق الإلكترونية التي تنتهك الأخلاق العامة. وأخيراً قانون رقم 12 لسنة 2022 بشأن الجرائم الجنسية، والذي يشمل الأفعال الجنسية غير الجسدية. ولكن لا توجد حتى الآن لائحة خاصة تنظم التحرش الجنسي اللفظي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أما النتيجة الثانية فهي الاقتراح لإضافة عبارة جديدة في المادة 5 من قانون رقم 12 لسنة 2022 بشأن الجرائم الجنسية، كحل تشريعي لمشكلة التحرش الجنسي اللفظي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث تنص على "كل من يرتكب فعلًا جنسياً غير جسدي، سواء كان مباشراً أو عبر وسائل إلكترونية، يستهدف

جسم أو الرغبة الجنسية أو الأعضاء التناسلية بهدف الحط من الكرامة الإنسانية بناءً على الجنس أو الأخلاق، يُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن 9 أشهر و/أو غرامة مالية لا تزيد عن 10,000,000 روبيه⁹